
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**Kus Indarto, Santi Rande, Friska Prastyah Harlis*, Muhammad Haidil Rivaldiansyah, Syahnaz Fahriza**Prodi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman

Abstract

This research aims to analyze the implementation of stunting management policies in East Kalimantan (Study at the East Kalimantan Provincial Health Service). Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation studies. The results of the research show that the implementation of the Stunting Management Policy in East Kalimantan carried out by the East Kalimantan Provincial Health Service has overall been implemented well, although it has not yet run optimally. There are several related indicators as follows: communication in the implementation of stunting management policies in East Kalimantan as a whole at the East Kalimantan Provincial Health Service has not been implemented optimally. Resources are still inadequate. The overall disposition in implementing this policy, the implementation of commitment and integrity, can be said to be good because it was implemented according to what was expected. The bureaucratic structure as a whole is running well, with the implementation of stunting management policies already in place Standard Operating Procedure (SOP).

Keywords: Policy Implementation, Stunting, East Kalimantan Province.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Timur (Studi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum berjalan secara maksimal. Adapun beberapa indikator terkait sebagai berikut komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Timur secara keseluruhan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana secara maksimal. Sumber daya masih kurang memadai. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan ini secara keseluruhan pelaksanaan komitmen dan integritas dapat dikatakan baik karena dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan. Struktur Birokrasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dimana dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting sudah memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)*.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Stunting, Provinsi Kalimantan Timur.

Article history:

Submission: September 17, 2024

Revised: September 25, 2024

Accepted: October 29, 2024

Published: December 15, 2024

**Corresponding author*Email: friska.p.h@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan data prevalensi stunting provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2020 khususnya di Samarinda pada tahun 2018 kasus stunting sebanyak 26,26 % pada tahun 2019 mengalami penurunan 24,75 dan pada tahun 2020 tetap di angka 24,7% (Apriyani, dkk, 2023). Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih tinggi dengan peningkatan sebesar 1,1 persen dari angka awal 22,8 persen menjadi 23,9%. Kemudian jumlahnya, di Kaltim mencapai 16.000 menurut data dari Dinas Kesehatan. Sementara, menurut Kepala Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) target yang harus dicapai Provinsi Kaltim sebesar 12,83% di tahun 2024. (<https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/rembuk-stunting-tingkat-provinsi-kalimantan-timur-tahun-2023>).

Stunting menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Di dalam peraturan tersebut termuat tentang target penurunan prevalensi stunting menjadi 14%. Ini juga memperkuat kerangka intervensi serta kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menurunkan angka stunting di Indonesia dimana meminta kepada seluruh kepala daerah berupaya dalam menurunkan angka stunting di daerah masing-masing. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Edward III, yang meliputi: Komunikasi (transmisi, clarity dan consistency), Sumberdaya (staf, anggaran, informasi dan kewenangan), Disposisi (sikap pelaksana dan insentif), Struktur birokrasi (SOP dan fragmentasi)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran guna menggali data yang diperlukan. Dinkes adalah sebagai implementor dalam Implementasi Penanganan Stunting di Kalimantan Timur. Observasi dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014). Teknik analisis data tersebut mencakup kondensasi data, display data dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN DISKUSI**Komunikasi**

Komunikasi merupakan penyampaian informasi atau pesan dari komunikator terhadap komunikan. Komunikasi tentunya berperan penting dalam penentuan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari implementator atau individu-individu yang bertanggung jawab dalam

pencapaian tujuan kebijakan, dengan menyampaikan informasi terkait kebijakan secara akurat kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi perbedaan pendapat dalam implementasi serta mengurangi resistensi dari kelompok sasaran. Oleh sebab itu, dalam komunikasi diperlukan adanya tiga aspek proses komunikasi kebijakan yang meliputi penyaluran (transmisi) penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kebijakan, serta konsistensi yang diberikan pelaksana kebijakan.

Transmisi (Proses Penyampaian Informasi)

Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi adalah proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, sehingga pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Menurut Edward III dalam Kandji inti dari sebuah komunikasi adalah bermuara pada penciptaan produktivitas kerja dan kinerja komunikasi, baik secara individual maupun kolektivitas dalam sebuah organisasi.

Proses penyampaian implementasi penanganan stunting di Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan disampaikan oleh pihak pusat kepada Dinas Kesehatan melalui zoom, rapat, ataupun melalui grup WhatsApp. Dalam penyampaian informasi tersebut, biasanya sebelum disampaikan kepada implementator, penyampaian informasi mengenai implementasi penanganan stunting disampaikan terlebih dahulu kepada koordinator, kepala seksi ataupun kepala bidang di Dinas Kesehatan.

Penyampaian informasi tersebut melibatkan intervensi dari berbagai pihak yang tentunya sangat penting bagi berjalannya implementasi penanganan stunting, terutama intervensi dari pemerintah pusat dalam memastikan bahwa informasi dan langkah-langkah dalam penanganan stunting dapat diterapkan secara efektif dan efisien yang akan berdampak positif bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar Dinas Kesehatan tidak mengalami hambatan dalam mengimplementasikan penanganan stunting di lapangan, sehingga penanganan stunting yang dilakukan kepada masyarakat dapat diterapkan dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa transmisi (proses penyampaian informasi) dalam implementasi penanganan stunting di Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui metode secara langsung, yakni dengan rapat antara pemerintah pusat dengan pihak yang terlibat dan secara tidak langsung melalui zoom dan grup WhatsApp. Komunikasi yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Dinas Kesehatan dalam menyampaikan implementasi penanganan stunting telah tersampaikan secara baik melalui koordinator, kepala bidang ataupun kepala seksi yang kemudian disampaikan kepada implementator kebijakan. Dengan penyampaian informasi yang telah tersampaikan dengan baik dan jelas, maka akan mengurangi kesalahpahaman (miscommunication) antar pelaksana kebijakan serta pelaksanaan dalam kebijakan akan dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Kejelasan

Edwards III juga menekankan pentingnya kejelasan. Menurut Edwards III dalam Winarno (2016: 157-158) untuk memastikan implementasi kebijakan yang diinginkan, petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan dengan jelas dan diterima oleh para pelaksana kebijakan. Jika pesan yang disampaikan terdapat ketidakjelasan tentang implementasi kebijakan, hal itu

akan menyebabkan interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna awal dari informasi atau pesan yang disampaikan. Namun demikian, ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan. Para pelaksana pada suatu titik membutuhkan fleksibilitas dalam menerapkan kebijakan tertentu.

Kejelasan penyampaian informasi dalam implementasi penanganan stunting di Kalimantan Timur sudah cukup jelas dalam penyampaiannya. Seperti yang telah disinggung, menurut Edwards III dalam Winarno (2016: 159) jika komunikasi yang disampaikan tidak terlalu jelas, para pelaksana akan mempunyai banyak keleluasan menginterpretasikan persyaratan-persyaratan kebijakan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman dalam implementasi di lapangan. Kejelasan penyampaian informasi terkait implementasi penanganan stunting dilakukan oleh pemerintah pusat kepada perangkat daerah yang mewakili. Kejelasan informasi yang disampaikan dapat membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memahami informasi dan instruksi yang diberikan dengan jelas dalam implementasi dalam penanganan stunting

Dalam penyampaian informasi penanganan stunting di Kalimantan Timur sering disampaikan dari Kemendagri kepada perangkat daerah, seperti Bappeda, Sekda, ataupun asisten yang mewakili perangkat daerah. Selain itu, Kementerian Kesehatan sering melakukan weekly meeting dengan Dinas Kesehatan untuk membantu implementator dalam pelaksanaan penanganan stunting dengan berdasarkan pada informasi dan instruksi yang diberikan untuk mencegah misskomunikasi. Penyampaian informasi mengenai penanganan stunting di Kalimantan Timur juga telah dapat dipahami oleh Dinas Kesehatan dengan baik dan jelas karena hal tersebut merupakan tugas dari masing-masing implementator dalam melaksanakan penanganan stunting.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kejelasan dalam penyampaian informasi terkait implementasi penanganan stunting di Kalimantan Timur sudah tersampaikan dengan jelas dan berjalan dengan optimal. Hal ini mencerminkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam program ini dapat dipahami secara menyeluruh, baik bagi implementator maupun bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mendukung upaya penanganan stunting secara efektif.

Konsistensi

Konsistensi adalah komponen ketiga yang mempengaruhi komunikasi dalam kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah dalam pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Menurut Edwards dalam Winarno (2016: 158) perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan harus mempunyai unsur kejelasan, tetapi jika tidak ada kejelasan, perintah tersebut tidak akan membantu para implementator dalam melakukan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana untuk mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Hal ini akan menyebabkan implementasi kebijakan yang tidak efektif karena tindakan yang sangat longgar mungkin tidak dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, konsistensi dalam penyampaian informasi terkait implementasi penanganan stunting di Kalimantan Timur kepada Dinas Kesehatan telah tersampaikan. Peraturan dan pedoman yang diterapkan dalam penanganan stunting tidak ada yang mengalami perubahan. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian terhadap

kondisi setiap daerah yang berbeda, tetapi tetap didasarkan pada peraturan utama. Hal tersebut tentunya memudahkan implementator dalam memahami dan melaksanakan implementasi penanganan stunting sesuai dengan peraturan ataupun pedoman yang telah ditetapkan. Untuk implementasi yang efektif, tidak hanya diperlukan komunikasi yang jelas, tetapi juga konsistensi. Pelaksana kebijakan akan kebingungan jika instruksi tidak konsisten meskipun proses transmisinya baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi penanganan stunting sudah tersampaikan dengan konsisten, yang berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada peraturan yang ada, setiap langkah dalam program penanganan stunting dirancang untuk lebih terarah dan terukur. Selain itu, konsistensi dalam penyampaian informasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan, baik dengan implementator maupun dengan masyarakat.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu hal penting yang mana mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi suatu kebijakan. Adapun indikator dalam faktor sumber daya yang ada di penelitian ini, yaitu:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam penelitian ini yang dimaksud adalah para pegawai. Seperti yang dikatakan Edward III dalam (Winarno, 2014, hal. 185) menyatakan bahwa kurangnya keahlian yang dimiliki para pegawai/staf di sisi yang lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik sebab akan mempengaruhi kebijakan yang efektif. Sehingga ketika pegawai yang tidak mencukupi baik dari segi kuantitas dan kemampuannya, maka diperlukan kecukupan pegawai dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Oleh karenanya Implementasi Pengendalian Stunting di Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan mampu bertanggung jawab pada bidang masing-masing kemudian, sumber daya manusia yang ada juga harus sesuai dengan kuantitas atau kebutuhannya.

Dalam penelitian ini sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang berperan sebagai implementor kebijakan baik di lapangan dan juga sebagai fasilitator serta mediator terkait dengan implementasi pengendalian stunting. Maka berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini masih belum terpenuhi secara keseluruhan dimana dari segi kualitas dan kuantitas masih menjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan masih belum mencukupi dan memadai dari segi keahlian maupun kemampuan. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini sendiri dikarenakan kurangnya pegawai dari beberapa bidang sehingga tugas yang ada harus di tanggung kepada beberapa orang yang bukan ahlinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pengendalian stunting masih kurang memadai dan mencukupi, dimana hal ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan yang dilaksanakan akan tidak efektif dan optimal hasilnya.

Sumber Daya Anggaran

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengendalian stunting, anggaran secara keseluruhan berasal dari APBD dimana di kelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan

Timur, berdasarkan informasi yang ada pada tahun 2024 anggaran direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah). Maka berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan secara keseluruhan mengatakan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan secara keseluruhan untuk pelaksanaan pengendalian stunting ini sudah cukup dan masuk ke dalam dana yang cukup besar. Namun, besarnya anggaran berpengaruh kepada kuantitas sumber daya manusia yang tidak seimbang sehingga resapan dana yang ada tidak berjalan secara maksimal karena penggunaan dana secara keseluruhan tidak sesuai dengan kuantitas sumber daya manusia yang ada.

Secara keseluruhan dana yang sudah di alokasikan digunakan secara maksimal dimana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur membuat atau menjalankan beberapa program yang mana sarannya merupakan balita-balita yang sesuai dengan sasaran, dimana program yang dijalankan di antaranya program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada balita kategori kurus tidak naik berat badan serta ibu hamil yang masuk kategori kurang gizi dan nutrisi.

Disposisi

Disposisi pada penelitian ini berkaitan dengan komitmen dan integritas yang diberikan kepada para pegawai dalam pengendalian stunting. Sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III dalam (Winarno, 2014, hal. 197) dimana apabila para pelaksana (implementor) bersikap baik pada suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan maka ada kemungkinan kebijakan akan berjalan sesuai harapan, demikian sebaliknya apabila implementor tidak setuju akan implementasi suatu kebijakan maka hasil yang didapatkan kurang maksimal. Pada dasarnya komitmen yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksana juga memiliki integritas yang tinggi terhadap apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, disposisi dalam penelitian ini secara keseluruhan berkaitan dengan bagaimana para pegawai memiliki komitmen dan integritas. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur telah memperlihatkan bahwa sebagai besar pegawai memiliki komitmen terhadap implementasi kebijakan apa yang sedang dilaksanakan. Dimana para pegawai secara keseluruhan memahami apa yang sudah menjadi tugasnya, sehingga secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa disposisi pada Dinas Kesehatan sudah terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III dalam Winarno (2016:176-177) birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi, yang pertama muncul sebagai tanggapan internal terhadap waktu dan sumber daya yang terbatas dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. *Standard Operating Procedure* (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) adalah salah satu aspek struktural yang paling penting di suatu organisasi. Dengan menggunakan *Standard Operating Procedure* (SOP), para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, *Standard Operating Procedure* (SOP) juga menyeragamkan cara para pejabat bertindak dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang meningkatkan fleksibilitas dan keseragaman dalam penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP). Menurut Edwards III dalam Winarno (2016: 181) *Standard Operating Procedure* (SOP) pada dasarnya merupakan sebagian reaksi terhadap sumber daya yang terbatas. Sumber daya berpengaruh terhadap peran kecenderungan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika

sumbarnya banyak, individu dan organisasi yang terlibat dalam implementasi akan relatif kurang bersaing untuk menjaga kepentingan dari organisasi mereka. Di samping itu, semakin banyak sumber daya yang tersedia bagi suatu organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi tersebut untuk mengubah prioritas untuk menanggapi tuntutan kebijakan baru.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa dalam implementasi penanganan stunting di Kalimantan Timur studi kasus Dinas Kesehatan telah diatur dengan prosedur yang dirancang sedemikian rupa dan tertuang di dalam suatu regulasi yang ada, yang di mana prosedur ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah disusun dengan baik, maka para implementator penanganan stunting dapat memahami dan menerapkan prosedur tersebut dengan efektif. Dengan demikian, kualitas pelayanan yang diberikan di dalam penanganan stunting akan lebih terjamin dan tentunya sesuai dengan standar yang diharapkan. Selain itu, di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penanganan stunting di Dinas Kesehatan terdapat intervensi, yakni intervensi sensitif yang berasal dari pemerintah daerah dan intervensi spesifik yang berasal dari Dinas Kesehatan, hal ini membantu memastikan bahwa semua pihak ikut terlibat dalam penanganan stunting yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berfokus pada hasil yang nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam implementasi penanganan stunting di Kalimantan Timur sudah tersedia dengan baik yang tertuang dalam regulasi yang ada, sehingga para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan implementasi sesuai dengan prosedur yang ada dan terstruktur.

Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian fragmentasi dalam implementasi penanganan stunting di Kalimantan Timur studi kasus Dinas Kesehatan telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan implementasi penanganan stunting di Dinas Kesehatan, pembagian tugas dan tanggung jawab telah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan implementasi penanganan stunting telah disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Pembagian tugas dan tanggung jawab ini sangat peran untuk memastikan bahwa setiap implementator dan tim pelaksana memiliki peran yang jelas dalam penanganan stunting yang dilakukan secara efektif dan terarah. Dengan demikian, setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam penanganan stunting dapat menjalankan perannya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, setiap anggota tim dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing dalam penanganan stunting sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penanganan stunting kepada masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam suatu kebijakan terhadap beberapa badan lainnya sudah terlaksana, meskipun dalam pelaksanaan fragmentasi ini masih ditemukan kendala, seperti pembagian tugas dan tanggung jawab yang belum seimbang yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi penanganan stunting di lapangan dapat mengurangi intervensi yang dilakukan, sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program penanganan stunting yang tidak berjalan dengan optimal.

Faktor Penghambat Implementasi Pengendalian Stunting Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur)

Implementasi pengendalian stunting pada dasarnya tidak bisa berjalan semulus rencana

yang sudah dibuat. Kebijakan yang terkadang sudah dirumuskan sebaik mungkin bahkan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Secara keseluruhan banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan baik dari faktor lingkungan, ataupun internal. Seperti halnya proses implementasi pengendalian stunting yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada narasumber berkaitan dengan hambatan yang dialami dalam proses implementasi Pengendalian Kasus Stunting di Kalimantan Timur, dimana hambatan tersebut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi resapan anggaran yang ada.
2. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap pola asuh dan juga pola makan
3. Kurangnya koordinasi antara pihak karena SDM yang tidak memadai

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik, walaupun belum berjalan secara maksimal. Adapun beberapa indikator terkait sebagai berikut:

Komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Timur secara keseluruhan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan baik walaupun secara keseluruhan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator terkait:

- a) Transmisi, proses penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Timur sudah dilakukan dengan baik dimana penyampaian informasi dilakukan secara langsung dimana rapat dilaksanakan, pengadaan *weekly meeting*, serta penyampaian melalui surat-menyurat dan juga melalui chat group Whatsapp.
- b) Kejelasan, penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Kalimantan Timur masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait yang mempengaruhi kejelasan informasi terganggu.
- c) Konsistensi, secara keseluruhan informasi dan kebijakan yang ada tidak mengalami perubahan, pelaksanaan tugas juga telah sesuai dengan apa yang disampaikan dimana informasi sudah diterima sesuai yang ditetapkan.

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting belum berjalan secara maksimal. Dimana dapat dilihat dari beberapa indikator terkait:

- a) Sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia yang ada pada pelaksanaan kebijakan penanganan stunting secara keseluruhan baik dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang memadai karena secara keseluruhan sumber daya manusia tidak memenuhi dari segi kapasitas yang diharapkan.
- b) Sumber daya anggaran, pengalokasian dan perencanaan dana yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Timur secara anggaran sudah termasuk cukup dan besar, namun hal ini masih dikatakan kurang maksimal sebab resapan anggaran yang sudah di alokasikan tidak berjalan secara optimal sebab hal ini dipengaruhi karena kurangnya sumber daya manusia yang ada.
- c) Disposisi, dalam pelaksanaan kebijakan ini komitmen dan integritas menjadi indikator disposisi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kalimantan Timur

secara keseluruhan pelaksanaan komitmen dan integritas dapat dikatakan baik karena dilaksanakan sesuai apa yang diharapkan.

- d) Struktur Birokrasi, secara keseluruhan berjalan dengan baik dimana dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting sudah memiliki SOP dan para pelaksana patuh dengan SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui aturan keputusan menteri, yang mana pembagian tanggung jawab berdasar pada aturan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai pelengkap dalam penelitian Implementasi Penanganan Stunting Di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut :

1. Terkait kejelasan informasi masih terdapat kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi yang disebabkan kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam implementasi penanganan stunting. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman dari para pemangku kepentingan mengenai pentingnya informasi yang akurat dan mengembangkan mekanisme komunikasi yang lebih baik. Selain itu, pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan semua pihak menjalankan peran mereka masing-masing dengan optimal dalam implementasi penanganan stunting ini.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang dapat dilihat dari kurangnya implementator dalam penanganan stunting, maka diperlukan rekrutmen pegawai yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, terkait dengan sumber daya manusia dalam implementasi penanganan stunting diperlukan pelatihan yang insentif, seperti training dan diklat kepada para pelaksana kebijakan agar dapat mengimplementasikan penanganan stunting dengan efektif. Terkait dengan anggaran yang terbatas, maka pemakaian dalam anggaran harus seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan mengalokasikan anggaran secara optimal.
3. Terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola asuh yang benar serta pemberian makanan asupan sesuai dengan gizi yang dibutuhkan, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, baik kepada kelompok sasaran ataupun kepada masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang benar dan pemenuhan gizi yang sesuai. Sosialisasi ini bisa dilakukan secara langsung, seperti seminar dan diskusi kelompok masyarakat, ataupun disosialisasikan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

REFERENSI

- Apriyani; Suwignyo; Kusumawati, Rindha Mareta; Wulandari, Kartina. 2023. Hubungan Sanitasi Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia Dini Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*. Vol. 10, No. 12: 3564- 3568.
- Bappeda Kaltim (<https://bappeda.kaltimprov.go.id/postingan/rembuk-stunting-tingkat-provinsi-kalimantan-timur-tahun-2023>).
- Maulana, Ilham Nur Hanifan, Sholihah, Qomariyatus dan Wike. 2022. Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. Vol 8, No 2: 136-144.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods*

Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1995/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Saadah, N. (2020). Modul Deteksi Dini Pencegahan dan Penanganan Stunting. Scopindomedia.

Sahroji, Qotrun Nada; Hidayat, Rahmat; Nababan. Rudyk. 2022. Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. Jurnal Pemerintahan Dan Politik Vol. 7 No.1: 34-39.

Shauma, Nabila Udzrotu dan Purbaningrum, Dini Gandini. 2022. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahanstuntingterintegrasi (Implementation Of Integrated Stunting Prevention Policy). Jurnal Kebijakan Publik. Vol. 13, No.2:200-207.

Sunaryo, Dian Rosa; Candradewini, Arifianti, Ria. 2021. Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik. Vol. 4 No. 4: 205 – 213.